



Informasi Strategis

Minggu, 31 Januari 2020

Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat
Gedung AH Nasution Lt. 14

BIDANG DALAM NEGERI

1 KKP Tindak Lanjuti Informasi Dijualnya Pulau Lantigiang Selayar Seharga Rp 900 Juta

Pada tanggal 30 Januari 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menindaklanjuti informasi terkait penjualan Pulau Lantigiang, Kep. Selayar oleh Syamsu Alam kepada Asdianti seharga Rp 900 Juta. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Jinato, Nur Aisyah Amnur. Beberapa saksi telah diperiksa oleh pihak Polres Selayar, dan calon pembeli sudah membayar Rp 10 juta. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Dr. TB Haeru Rahayu mengatakan, KKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menentukan langkah selanjutnya. Ia menyebutkan, Pulau Lantigiang masih bagian dari Taman Nasional Taka Bone Rate.

LEVEL KEPENTINGAN NASIONAL

REDAH SEDANG TINGGI

LEVEL KEPENTINGAN PROVINSI

REDAH SEDANG TINGGI

LEVEL KEPENTINGAN KABUPATEN

REDAH SEDANG TINGGI

2

ANALISIS

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya oleh Penanaman Modal Asing (PMA), harus mendapatkan izin Menteri KP. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2019, telah membatasi luasan pemanfaatan lahan di pulau-pulau kecil. Pulau kecil tidak dapat diperjualbelikan, apalagi kepada warga negara asing karena pada setiap pulau terdapat penguasaan oleh negara minimal 30 persen dari luasan pulau-pulau kecil. Apabila terjadi pada pulau terdepan, hal ini akan berdampak lebih fatal, karena berpengaruh kepada kedaulatan negara.

3

DAMPAK

Praktik jual beli pulau oleh individu di wilayah Indonesia dapat mempengaruhi kerawanan dalam pengawasan keamanan wilayah dan berdampak langsung terhadap lingkungan hidup.

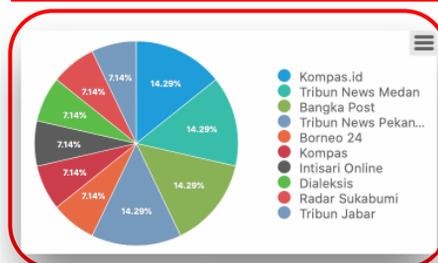
4

SARAN

Kemhan perlu terlibat dalam pengelolaan setiap jengkal wilayah Indonesia agar dapat disesuaikan dengan Tata Ruang Wilayah Pertahanan. Untuk pengaturan tersebut diperlukan kajian wilayah pertahanan yang komprehensif.

MEDIA EXPOSURE

18 Berita Online (Lokal/Nasional)



BIDANG ASIA PASIFIK

IRAN DESAK AS UNTUK LEBIH DULU KEMBALI KE KESEPAKATAN NUKLIR 2015

1

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menegaskan bahwa Amerika Serikat (AS) harus bertindak lebih dahulu dengan kembali ke kesepakatan nuklir 2015. Pemerintah Iran tidak akan menerima tuntutan AS untuk membatalkan percepatan program nuklirnya sebelum dicabutnya sanksi atas Iran oleh AS. Hal ini karena AS adalah pihak pertama yang melanggar kesepakatan tersebut sehingga bukanlah Iran yang harus mengambil tindakan pertama untuk kembali ke kesepakatan nuklir 2015.



2

ANALISIS

Pernyataan Menlu Iran tersebut merupakan respon terhadap pernyataan Menlu AS Antony Blinken yang menuntut Iran untuk kembali mematuhi pembatasan aktivitas nuklirnya. Drama kedua negara kembali memasuki episode baru ketika Joe Biden telah dilantik menjadi Presiden AS. Proses kembalinya kedua negara ke kesepakatan nuklir 2015 sepertinya akan berlarut dan ancaman terhadap stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah tetap akan tinggi.



INDIKATOR ANCAMAN TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL

AMAN

MENGKHAWATIRKAN

WASPADA

SIAGA



IMPLIKASI POLITIK

IMPLIKASI SOSIAL

IMPLIKASI EKONOMI

IMPLIKASI HUKUM

IMPLIKASI HANKAM

BERDAMPAK TIDAK LANGSUNG

3

DAMPAK

Situasi ini tentunya akan dimanfaatkan oleh Israel yang tidak mendukung kesepakatan nuklir tersebut untuk mempengaruhi pemerintahan Joe Biden agar bersikap lebih keras terhadap Iran sehingga potensi konflik bersenjata akantetap ada.

4

SARAN

Pemerintah Indonesia dhi. Kemlu melalui perwakilannya di PBB untuk mendorong kembalinya Iran dan AS ke kesepakatan nuklir 2015 di dalam forum-forum PBB dengan menyelesaikan segala permasalahan dan perbedaan yang timbul di masa pemerintahan Presiden Donald Trump sehingga akan membawa perdamaian ke kawasan Timur Tengah.

1 FAKTA/DATA

Regulator Uni Eropa Menyetujui Vaksin COVID AstraZeneca Untuk Semua Usia Di Atas 18 Tahun.

European Medicines Agency (EMA) sebagai badan regulator penyediaan vaksin bagi seluruh masyarakat Uni Eropa mengatakan akan memperkenalkan kontrol ekspor pada vaksin Covid-19 yang diproduksi. Regulator medis Uni Eropa telah mengizinkan vaksin Covid-19 yakni AstraZeneca untuk digunakan pada orang berusia 18 tahun ke atas di seluruh UE, di tengah kritik bahwa UE tidak bergerak cukup cepat untuk memvaksinasi populasinya. EMA melisensikan vaksin untuk orang berusia 18 tahun ke atas setelah komite vaksin Jerman merekomendasikan bahwa vaksin itu hanya boleh diberikan kepada orang berusia 18-64 tahun, karena ada anggapan menimbulkan kekhawatiran bahwa tidak ada cukup data untuk membuktikannya berhasil pada orang tua. Suntikan tersebut adalah vaksin COVID-19 ketiga yang diberi lampu hijau oleh EMA, setelah yang dibuat oleh Pfizer dan Moderna. Keduanya diizinkan untuk semua orang dewasa. Keputusan tersebut membutuhkan persetujuan akhir dari Komisi Eropa, sebuah proses yang berlangsung cepat dengan vaksin lain.

INDIKATOR ANCAMAN TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL



2 ANALISA

Keputusan UE ini dibutuhkan sebagai bentuk perlindungan diharapkan, mengingat bahwa tanggapan kekebalan terlihat pada kelompok usia ini dan berdasarkan pengalaman dengan vaksin lain. Vaksin tersebut dapat digunakan pada orang dewasa yang lebih tua. Banyak negara di UE telah berjuang untuk memvaksinasi orang secepat Inggris, Israel, Amerika Serikat, dan tempat lain, dan sudah lama diharapkan suntikan AstraZeneca akan membantu mempercepat pekerjaan. Persetujuan itu datang di tengah perselisihan sengit antara pembuat obat Anglo-Swedia dan blok tersebut setelah perusahaan mengatakan akan memasok UE dengan dosis yang lebih sedikit dalam tiga bulan pertama tahun ini daripada yang direncanakan, mengutip masalah produksi di pabrik manufakturnya di Belgia.

3 DAMPAK

UE berinvestasi besar-besaran dalam suntikan AstraZeneca, yang lebih murah dan lebih mudah ditangani daripada beberapa vaksin lain, dengan pesanan 300 juta dosis akan dikirimkan setelah otorisasi dan opsi untuk 100 juta dosis lagi. Ini sangat penting mengingat UE kesulitan meluncurkan vaksinasi pada saat negara-negara menghadapi lonjakan kasus dalam pandemi yang telah merenggut nyawa lebih dari 400.000 orang di blok 27 negara. Selain itu, Komisi Eropa mengatakan telah menyetujui rencana untuk mengontrol ekspor vaksin dari Uni Eropa, termasuk ke Inggris, dengan alasan perlu dilakukan untuk memastikan pasokannya sendiri.

4 SARAN

1. Kemhan mendukung Kemlu, menjadikan penyediaan vaksin Covid-19 bagi seluruh masyarakat secara menyeluruh sebagai prioritas diplomasi Indonesia tahun 2021, dimana dibutuhkan kerja sama global untuk memperkuat infrastruktur dan tata kelola kesehatan; ketahanan ekonomi dunia; memperkuat multilateralisme dan mengesampingkan rivalitas. Indonesia juga dapat berkontribusi, diplomasi Indonesia dituntut untuk anticipative, adaptive, dan agile.